

**NILAI TAMBAH EKONOMIS PERKEBUNAN KARET RAKYAT
KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENDEKATAN *NEW INSTITUTIONAL
ECONOMIC***

Romagia, SE, M.Si

Program Studi Admnistrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri.

Email: romagiasukses@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi perkebunan karet rakyat yang luas. Luas perkebunan karet sendiri pada tahun 2014 mencapai 26.415,90 ha atau sebesar 7,20% dari total luas perkebunan keseluruhan. Namun sampai saat ini pemanfaatan produk perkebunan tersebut belum memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat petani maupun masyarakat secara umum. Oleh sebab itu dipandang penting untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis perkebunan karet rakyat di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan tinjauan *new institutional economic*. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa sekitar 76% pendapatan rumah tangga petani karet di kabupaten Pelalawan ditopang oleh penghasilan dari perkebunan karet mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa begitu banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tata niaga karet di Kabupaten Pelalawan cukup panjang dan panjangnya rantai tata niaga itu berakibat kepada rendahnya harga jual di tingkat petani, karenanya petani hanya bisa menerima harga karet apa adanya. Pada akhirnya penelitian ini menemukan bahwa guna peningkatan nilai tambah ekonomis perkebunan karet rakyat perlu melakukan perbaikan kelembagaan perkebunan karet di Kabupaten Pelalawan.

Kata Kunci: Nilai tambah ekonomi, Pendekatan *New Institutional Economic*.

Abstract

Pelalawan regency has the potential of smallholder rubber plantations are widespread. Extensive rubber plantations alone in 2014 reached 26415.90 ha or equal 7.20% of the total plantation area overall. But until now the utilization of plantation products has not been of great benefit both for the farmers and society in general. Therefore it is considered essential to increase the economic value added of smallholder rubber plantations in Pelalawan. This study uses a new institutional economic review. Results of the study found that approximately 76% of household income rubber farmers in the regency is supported by income from their rubber plantation. The study also found that so many layers of traders involved, making the chain the marketing of rubber in Pelalawan long enough and long chain trade system that resulted in a low selling prices at the farm level, hence farmers can only receive the price of rubbers. In the end, the study found that in order to increase economic value added of smallholder rubber plantations need to make institutional improvements rubber plantation in Pelalawan.

Keywords: Economic value added, Approaches New Institutional Economics.

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, pada tahun 2014 Kabupaten Pelalawan memiliki luas areal perkebunan secara keseluruhan mencapai 410.012, 28 ha. Diantaranya merupakan perkebunan Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit, Sagu. Luas perkebunan karet sendiri pada

tahun 2014 mencapai 26.415,90 ha atau sebesar 7,20% dari total luas perkebunan keseluruhan.

Jumlah ini merupakan potensi yang cukup besar. Namun sampai saat ini pemanfaatan produk perkebunan tersebut belum memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat petani maupun masyarakat secara umum.

Romagia

Disamping itu sejauh ini untuk produk karet pabrik-pabrik yang ada di Riau hanya mengekspor karet dalam bentuk *sheet* keluar yang dari sisi harga tentunya masih murah.

Disamping potensi produksi per tahun dari produk perkebunan yang besar, hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai tambah perkebunan adalah melihat keberlanjutan produksi dan kemungkinan peningkatan produksi perkebunan. Hal ini diperlukan untuk karena informasi menyangkut keberlanjutan produksi sangat diperlukan. Kegiatan untuk meningkatkan produksi ini merupakan bagian dari pemberdayaan perkebunan, baik pemberdayaan petani/pekebun maupun pemberdayaan lahan.

Persoalan yang muncul berkaitan dengan keberlanjutan produksi perkebunan rakyat khususnya adalah pada rendahnya kapasitas produksi yang dihasilkan dari perkebunan karet rakyat yang terus mengalami penurunan. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk mengkaji perbaikan nilai tambah ekonomis petani perkebunan karet di Kabupaten Pelalawan dalam hal ini dikaji dalam Pendekatan *New Institutional Economic*.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Nilai Tambah Ekonomis Perkebunan Karet Rakyat Kabupaten Pelalawan dalam Pendekatan *New Institutional Economic* ini dilakukan di wilayah-wilayah yang memiliki perkebunan karet di Kabupaten Pelalawan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, kuisisioner dan studi lapangan.

Untuk menentukan pendapatan petani /pekebun ini maka unit analisisnya adalah rumah tangga.

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung pendapatan dan share pendapatan adalah :

$$A_n = Y P_y - X_i P_i - F_c$$

dimana :

A_n = Pendapatan dari perkebunan

Y = Produksi perkebunan

P_y = Harga produksi

X_i = Input variabel

P_i = Harga input variabel

F_c = Biaya tetap

Kontribusi pendapatan perkebunan terhadap pendapatan rumah tangga dihitung dengan menggunakan rumus :

$$K = (A_n / A_t) \times 100\%$$

K = Kotribusi perkebunan terhadap pendapat total rumah tangga

A_n = Pendapatan dari perkebunan

A_t = Pendapatan total rumah tangga

Analisis yang digunakan untuk menentukan jalur /distribusi pemasaran dilakukan untuk menentukan margin pemasaran yang dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$M_j = \sum C_{ij} + \pi_j$$

Dimana:

M_j = Margin rantai tata niaga ke – j

C_{ij} = Biaya ke-i pada rantai tata niaga ke- j

π_j = Laba (Keuntungan) rantai tata niaga ke- j

i = 1,2,3,...m ;

m = jumlah jenis pembiayaan

j = 1,2,3,...n ;

n = jumlah rantai tata niaga

Sedangkan untuk mencari keuntungan (π_j) pada rantai tata niaga ke – j dicari dengan menggunakan

formula sbb :

$$\pi_j = P_j - \sum C_{ij}$$

dengan :

P_j = Harga jual rantai tata niaga ke – j

PEMBAHASAN

Tingkat Pendapatan Petani Perkebunan Di Kabupaten Pelalawan

Tingkat pendapatan petani adalah ukuran utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan petani berdasar pada kepemilikan atau upaya ekonomi yang dilakukan setiap rumah tangga sehingga menghasilkan nilai ekonomi tertentu pada waktu tertentu baik harian, mingguan atau bulanan.

Tingkat ekonomi juga ditentukan dari komoditas yang diupayakan oleh para petani tersebut, harga yang berlaku terhadap komoditi tersebut, serta biaya variabel dan biaya tetap yang berlaku yang sifatnya mempengaruhi tingkat pendapatan petani.

Berdasarkan formula yang digunakan untuk menghitung pendapatan dan share pendapatan maka diperoleh hasil bahwa produksi perkebunan karet di kabupaten Pelalawan umumnya berkisar antara 50-75 kg/ hektar/ minggu. Maka diambil rata-ratanya 67 kg/ hektar/minggu, dengan asumsi harga panen karet ditingkat petani setelah dikurangi penyusutan adalah Rp 7.500,-

Input variabel pada perkebunan karet adalah biaya angkut hasil panen dari kebun ke rumah petani yang dari wawancara dilapangan berkisar paling besar adalah setara dengan 0,5 sedangkan harga input variabel (bensin/ liternya Rp. 6000). Maka dengan demikian biaya bensin adalah Rp.3000/ minggu. Disamping biaya angkut, input variabel lainnya adalah biaya cuka.

Harga cuka asam semut perbotolnya adalah Rp. 5000,- Dalam setiap panen/hektarnya diperkirakan menghabiskan cuka 0,5 botol, maka dengan demikian biaya cuka adalah Rp. 2500,-.

Biaya tetap dalam hal ini adalah biaya pembelian pisau sadap. Harga pisau sadap berkisar antara Rp 30.000. umur ekonomis pisau sadap berkisar sekitar 12 bulan. Jika satuan perhitungan pendapatan petani adalah perminggu maka biaya tetap dengan demikian adalah Rp. 30.000 / 48 minggu = Rp 625,- perminggu.

Dari asumsi diatas maka diperoleh perhitungan pendapatan petani/hektar/minggu sebagai berikut:

$$An = YPy - XiPi - Fc$$

$$An = 67 \text{ kg} \times \text{Rp.7500} - (\text{Rp.3000} + \text{Rp.2500}) - \text{Rp.625}$$

$$An = \text{Rp.502500} - (\text{Rp.3000} + \text{Rp.2500}) - \text{Rp.625}$$

$$An = \text{Rp.496.375,-}$$

Berdasarkan metode yang digunakan untuk menghitung kontribusi pendapatan perkebunan terhadap pendapatan rumah tangga dari wawancara dilapangan, didapat informasi bahwa jika petani perkebunan karet memiliki kebun sebanyak 2 hektar ditambah pendapatan lain-lain yang berasal dari hasil sayur-mayur, ternak, berdagang kecil-kecilan dan lain-lain, maka pendapatan total rumah tangga petani perkebunan karet perminggunya berkisar antara Rp. 1.100.000 – Rp.1.500.000 perminggu. Jika diambil rata-ratanya maka total pendapatan rumah tangga petani perkebunan karet sebesar 1.150.000. maka dengan demikian diperoleh perhitungan:

$$K = (\text{Rp. 990.000} / \text{1.300.000}) \times 100\%$$

$$K = 76\%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa sekitar 76% pendapatan rumah tangga petani karet di kabupaten Pelalawan ditopang oleh penghasilan dari perkebunan karet mereka. Hanya saja dalam satu bulan, jumlah minggu yang efektif yang bisa dimanfaatkan petani untuk menyadap karet lebih kurang hanya 3 minggu hal ini dikarenakan adanya hujan dan libur untuk keperluan lainnya.

Asumsi pendapatan diatas adalah asumsi jika kebun karet tidak dipupuk. Namun jika dipupuk tentunya memerlukan biaya tetap yang bertambah. Pemupukan karet dilakukan sekali 6 bulan. Jika biaya pupuk yang dihabiskan adalah Rp. 2.000.000, sedangkan dalam sebulan petani bisa memanen sebanyak 3 kali, maka biaya pupuk yang dibebankan persekali panen kira-kira Rp.112.000. Berdasarkan wawancara apabila dipupuk maka akan terjadi peningkatan hasil panen. Dalam satu hektar/ perminggu hasil panen bisa meningkat menjadi lebih kurang 30% atau menjadi sekitar 83 kg. Dari asumsi diatas maka diperoleh perhitungan pendapatan petani/hektar/minggunya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 An &= YPy - XiPi - Fc \\
 An &= 87 \text{ kg} \times \text{Rp.7500} - \\
 &(\text{Rp.3000} + \text{Rp.2500}) - \text{Rp. 625} + \text{Rp.} \\
 &112.000 \\
 An &= \text{Rp. 534.375}
 \end{aligned}$$

Jalur Pemasaran Produk Perkebunan Karet

Penelitian ini menemukan bahwa begitu banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tata niaga karet di Kabupaten Pelalawan cukup panjang, dan kondisi demikian sudah merupakan suatu fenomena lama. Paling kurang mereka harus melalui dua atau tiga orang

pedagang perantara yaitu pedagang di tingkat desa dan pedagang di tingkat kecamatan. Faktanya di desa-desa penghasil karet ditemukan ada pengumpul tingkat desa dan pengumpul tingkat kecamatan baru kemudian sampai ke pabrik pengolahan karet.

Lebih lanjut ditemukan juga bahwa panjangnya rantai tata niaga itu berakibat kepada rendahnya harga jual di tingkat petani, karenanya petani hanya bisa menerima harga karet apa adanya. Jadi tidak mustahil bila kehidupan sosial ekonomi petani karet masih rendah dan jauh tertinggal. Dengan begitu, meskipun produksi karet-rakyat tinggi, tapi menjadi tidak banyak berarti karena tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya.

Berdasarkan metode yang digunakan untuk menentukan jalur /distribusi pemasaran, dari hasil wawancara dilapangan diperoleh informasi bahwa para pedagang mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan harga beli karet pada petani. Faktor tersebut diantaranya biaya susut karet, biaya buruh dan biaya angkut. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa biaya pada rantai tata niaga adalah biaya-biaya yang berasal dari faktor tersebut diatas.

Berdasarkan wawancara dengan para pedagang maka diperoleh informasi bahwa biaya susut ditentukan dari kadar kekeringan karet petani. Potongan yang berlaku umumnya mencapai 5% dari harga jual petani ke pedagang. Jika harga jual karet di pabrik mencapai Rp 11.500 maka dan biaya susut sebesar 5%, maka 5% dari 11500 = Rp 575.- Biaya buruh umumnya mencapai Rp. 50,- sampai Rp 100,- perkilogramnya, sedangkan biaya angkut biasanya dikenakan pedagang sebesar Rp 300- Rp 500 perkilonya.

Keuntungan yang akan diambil oleh pedagang umumnya berkisar Rp 500,- sampai dengan Rp 1000,- maka:

$$M_j = \sum(\text{Rp.575} + \text{Rp.300} + \text{Rp.100}) + \text{Rp.1000}$$

$$M_j = \text{Rp.1975}$$

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selisih antara pembelian pedagang besar ke pedagang/pengumpul desa adalah sebesar Rp.1975,- atau Rp. 11.500- Rp.1975 = 9525 yang selanjutnya bisa dikatakan modal beli pedagang besar ke pedagang/ pengumpul desa. Atas dasar hal tersebut, dari perhitungan maka diperoleh keuntungan pedagang/pengumpul besar adalah sebesar:

$$\pi_j = \text{Rp.11.500} - \sum(\text{Rp.9525} + \text{Rp.575} + \text{Rp.300} + \text{Rp.100})$$

$$\pi_j = \text{Rp.11.500} - \text{Rp.10.500}$$

$$\pi_j = \text{Rp.1000}$$

Selanjutnya dasar perhitungan margin pemasaran diatas juga berlaku pada rantai tata niaga selanjutnya (pedagang/pengumpul desa yang langsung membeli ke petani karet). Persentase potongan biasanya tetap akan berlaku 5%, yakni 5% dari harga beli pengumpul desa ke petani atau 5% x Rp.9525 = Rp.475

$$M_j = \sum(\text{Rp.475} + \text{Rp.300} + \text{Rp.100}) + \text{Rp.1000}$$

$$M_j = \text{Rp.1875}$$

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selisih antara penjualan pengumpul desa dengan pembelian di petani sebesar Rp. 1875,-. Maka harga beli pengumpul desa ke petani dengan demikian adalah Rp. 9525 – Rp.1875, = Rp 7650,-

Dari perhitungan diatas maka diperoleh keuntungan pengumpul desa sebagai berikut:

$$\pi_j = \text{Rp.9.525} - \sum(\text{Rp.7.650} + \text{Rp.470} + \text{Rp.300} + \text{Rp.100})$$

$$\pi_j = \text{Rp.9525} - \text{Rp.8520}$$

$$\pi_j = \text{Rp.1005,-}$$

Dari perhitungan rantai tata niaga karet ini dapat diketahui bahwa selisih harga di pabrik petani adalah Rp.11.500 – Rp. 7.650 = Rp. 3.850- . Selisih nominal yang disebabkan oleh panjangnya mata rantai pemasaran ini tentunya sangat besar dan berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan Petani karet.

Penataan Kelembagaan

Solusi dari persoalan-persoalan diatas, bermula dari penataan kelembagaan disektor perkebunan rakyat. Kelembagaan akan memunculkan sinergi dari berbagai pihak sehingga dapat mengupayakan bentuk solusi bersama yang akan meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan taraf hidup petani perkebunan rakyat.

Faktor kelembagaan tidak hanya dipahami secara sederhana sebagai kehadiran sebuah lembaga yang menaungi para petani perkebunan rakyat semata. North (!991) mendefinisikan kelembagaan sebagai aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia (*humanly devised*) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial (North, 1990b: 3).

Pemikir lainnya Rutherford (1994), memaknai kelembagaan dalam pengertian yang hampir sama dengan North, bahwa kelembagaan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota kelompok sosial misalnya dalam hal ini adalah para petani perkebunan rakyat di Kabupaten Pelalawan, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun yang dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) misalnya oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari dua pengertian diatas

dapat dilihat baik North maupun Rutherford sama-sama menekankan kata kunci aturan dan atau regulasi sebagai inti dari pengertian kelembagaan itu sendiri.

Dalam pengertian yang lebih praktis menurut definisi Brinkerhoff and Goldsmith (1992) dan juga menurut World Bank (2002, institusi adalah aturan prosedur yang mempengaruhi bagaimana orang-orang berinteraksi, institusi juga adalah organisasi yang mengimplementasikan aturan untuk mencapai keinginan bersama dalam organisasi (Arsyad, 2005).

Peran institusi atau kelembagaan dalam dunia ekonomi dipandang sangat penting. Pandangan Neo klasik yang menanggapi kelembagaan tidak begitu penting selama ini ternyata tidak terbukti. Pada kenyataannya kelembagaan sangat berperan dalam berjalannya proses ekonomi pasar yang ternyata banyak mengalami kegagalan terutama di negara berkembang seperti kasus rendahnya harga panen komoditi perkebunan dan panjangnya mata rantai pemasaran perkebunan seperti yang terjadi di kabupaten Pelalawan. Dalam pandangan North (1990), peranan utama institusi ditekankan pada pengurangan ketidakpastian yang terjadi dalam masyarakat (seperti yang terjadi pada ketidakpastian kualitas bibit dan harga panen komoditi perkebunan di kabupaten Pelalawan) dengan cara menyelenggarakan suatu interaksi manusia yang stabil (North, 1990b:6).

Dalam konteks pengelolaan perkebunan rakyat di kabupaten Pelalawan, kegagalan pasar sangat nyata terjadi. Pasar komoditi perkebunan di kabupaten Pelalawan belum menjadi pasar yang memberikan keadilan bagi pelaku petani perkebunan rakyat. Kegagalan pasar yang terjadi dalam konteks petani perkebunan rakyat

di kabupaten Pelalawan antara lain adalah inefisiensi pasar sehingga rantai pemasaran produk hasil perkebunan di kabupaten Pelalawan masih terlalu panjang (inefisiensi) dan mahalnya harga pupuk. Terdapat biaya transaksi (*transaction cost*) yang tinggi yang harus ditanggung petani sehingga harus ada campur tangan pemerintah dalam hal ini.

Pembahasan *transaction cost* salah satunya dimulai oleh Coase, (1937) yang berpendapat bahwa transaksi ekonomi yang terjadi di pasar menghasilkan biaya yang tinggi.. *Transaction cost* dapat muncul sebelum, pada saat dan sesudah transaksi berlangsung. Hal ini tentunya akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan menyebabkan suatu pasar menjadi tidak efisien. Menurut Coase, *transaction cost* meliputi biaya informasi, negosiasi, monitoring, koordinasi dan enforcement (Kherallah and Kirsten 2001 : 19).

Biaya hal dihasilkan dari kondisi ketersediaan informasi merupakan kunci dari *transaction cost* (North, 1996: 27). Oleh sebab itu mengurangi biaya yang muncul akibat kondisi ketersediaan informasi ini berarti adalah upaya untuk mengurangi *transaction cost*. Namun kenyataannya, petani perkebunan di kabupaten Pelalawan dihadapkan pada kondisi *information asymmetry*, ketiadaan tentang informasi harga yang sebenarnya berlaku dimana informasi hanya dimiliki dan diketahui secara lengkap oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Keterbatasan ini tentunya akan merugikan petani perkebunan itu sendiri.

a. Principle-Agent, information and enforcement

Sejarah pembangunan pertanian nasional mencatat bahwa telah terdapat berbagai bentuk kelembagaan yang

coba dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia antara lain:

1. KUD (Koperasi Unit Desa) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa),
2. KUBA (Kelompok Usaha Bersama Agribisnis),
3. KOPTAN (Koperasi Pertanian),
4. KUAT (Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu), Kelompok Tani, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)
5. Dan lain sebagainya

Namun kehadiran berbagai bentuk lembaga pertanian tersebut bukan tidak mengalami persoalan. Kelembagan petani perkebunan masih dianggap memiliki banyak persoalan antara lain:

1. Rendahnya kualitas sumber daya pengelola,
2. Kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab pengurus maupun anggota,
3. Lemahnya penguasaan modal (tidak adanya biaya operasional pengurus),
4. Pengurus tidak cakap atau tidak jujur.

Persoalan-persoalan yang muncul dalam pengelolaan lembaga diatas menurut pandangan ekonomi kelembagan adalah persoalan penataan hubungan *principle* dan *agent*. *Principle* dalam konteks kajian ini adalah petani yang merupakan pihak yang sangat berkepentingan agar pengelolaan kelembagaan berjalan dengan baik. Sedangkan *agent* adalah para pengelola lembaga-lembaga yang sudah ada atau yang akan dibentuk nantinya di kalangan petani perkebunan di kabupaten Pelalawan. Penjelasan tentang peran berbagai pihal ini akan dijabarkan dalam sub bab rekomendasi dibawah ini.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelompok tani berserta manfaat yang diperolahnya di kalangan

petani perkebunan di Kabupaten Pelalawan sudah tinggi akan hal ini. Mayoritas responden yakni sebesar 100% responden mengatakan bahwa kehadiran kelompok tani adalah hal yang sangat dibutuhkan dan memberikan manfaat yang besar. Menurut Petani manfaat yang bisa mereka peroleh dengan adanya kelompok tani/ KUD atau sejenisnya diantaranya adalah bisa mempermudah perolehan pupuk dan bibit, informasi harga tersedia dengan baik dan harga diharapkan bisa ditingkatkan.

Tabel 8.1: Perlu tidaknya Kelompok Tani

		Frequency	Perce nt	Valid Perce nt	Cumulative Percent
Valid	1.00	390	100.0	100.0	100.0

Ket: 1 = perlu
2 = tidak perlu

Mayoritas petani perkebunan karet, tidak hanya di kabupaten Pelalawan, tetapi dikabupaten lainnya di Riau belum memiliki Kelompok Tani / KUD dan sejenisnya. Petani perkebunan karet cenderung berusaha sendiri-sendiri. Dari penyebaran kuisisioner diperoleh fakta bahwa 94% lebih petani perkebunan di kabupaten Pelalawan belum memiliki kelompok tani. Kelompok tani karet ada ditemukan di Desa Rantau Jaya Kecamatan Sekijang, namun Kelompok tani ini anggotanya terdiri dari 75% petani sawit dan 25% petani karet.

Tabel 8.2 : Kelompok Tani

		Fre que ncy	Perce nt	Valid Perce nt	Cumulati ve Percent
Valid	1.00	22	5.6	5.6	5.6
	2.00	368	94.4	94.4	100.0
Total		390	100.0	100.0	

Ket: 1= sudah tergabung
2 = belum tergabung

Agency theori adalah salah satu hal yang juga mendapat perhatian penting dalam ekonomi kelembagaan.

Menurut Eisenhardt, (1985), *agency theory* bertendensi menjelaskan tentang hubungan organisasional antara *Principles* dan *Agents* (<http://www.babson.edu>). Dalam *agency theory*, *Agents* (dalam hal ini adalah pengelola kelompok tani/ KUD dan sejenisnya) diharapkan dapat memenuhi kepentingan dari *Principles* (petani perkebunan rakyat), namun *Agents* dalam hal ini sering mengambil keputusan dan menjalankan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan dari *principle* (Padilla, 2002).

Kondisi ideal dari sebuah lembaga yang berjalan dengan baik ditandai dengan berjalannya pengawasan (*monitoring*) dan penegakan kelembagaan (*enforcement*). Dalam hubungan *Principles* dan *Agents*, idealnya menurut North (1996), *Principles* memiliki daya untuk mendisiplinkan *Agents* sesuai dengan tujuan yang diinginkan lembaga-lembaga seperti kelompok tani/ koperasi petani dan lain sebagainya, disamping itu, *Agents* dapat memonitor *Principles* dan menegakkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian yang diatur diawal hubungan *Principles* dan *Agents* (Nort, 1996: 33).

Hubungan ini sering memunculkan permasalahan yang berdampak pada kinerja dan kualitas kelembagaan. Rock dkk, (1998) melihat bahwa kekurangan sempurnaan kebijakan dalam kelompok tani/ koperasi dan lain sebagainya yang disertai dengan pengelolaan yang tidak efektif oleh pihak pengurus dan manajemen kelompok tani/ koperasi dan lain sebagainya mengakibatkan ketidakmampuan mereka memenuhi kewajibannya terhadap anggota. (*Principless and Practices of Microfinance Governance, 1998*)

Persoalan ini menurut Padilla kemudian melahirkan ketidakpastian.

Ketidakpastian ini muncul dengan beberapa cara yakni; pertama, *Principles* meragukan keputusan dan tindakan dan hasil yang dicapai oleh *Agents* dan atau informasi yang dikelola oleh *Agents*. Hal ini dinamakan dengan *asymmetric information* atau informasi asimetri, karena *Agents* dalam hal ini memiliki informasi yang penuh tentang pengelolaan lembaga sedangkan *Principles* tidak memilikinya (Padilla, 2002)

Dalam pengelolaan lembaga tersebut, berkaitan dengan hubungan antara *priciples* dan *Agents*, menurut Moldoveanu and Martin (2001) terdapat tiga penyebab ketertutupan perusahaan yakni; ketertutupan dalam hal aspek legal formal, ketertutupan dalam hal informational dan ketertutupan dalam aspek motivasi. Khusus dalam hal ketertutupan informasi, Moldoveanu and Martin (2001) mengungkapkan bahwa ketertutupan informasi terjadi dalam tiga wilayah antara lain; pertama, ketertutupan informasi yang membatasi *principle* dari informasi yang mereka butuhkan agar lembaga memiliki kompetensi yang baik. Kedua, ketertutupan informasi yang membatasi *principle* dari informasi yang penting dan relevan tentang jalannya lembaga. Ketiga, ketertutupan informasi yang membatasi manajer dari informasi yang dipegang oleh pekerja mereka. (Moldoveanu and Martin, 2001 :7).

Pemecahan masalah informasi antara *Principles* dan *Agents* ini menurut Arrow mensyaratkan pembuatan aturan terhadap hambatan-hambatan struktur dan perilaku yang mendorong orang-orang dalam lembaga atau perusahaan membuka informasi sehingga dapat memonitor kinerja lembaga dan kinerja *Agents* setiap waktu (Moldoveanu and Martin (2001 : 9-10). Dalam konteks pengelolaan kelembagaan di kalangan petani

perkebunan rakyat di kabupaten Pelalawan, pembuatan aturan tersebut harus melibatkan unsur terkait secara sinergis seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

Kondisi ideal dari sebuah lembaga yang berjalan dengan baik ditandai dengan berjalannya pengawasan (*monitoring*) dan penegakan kelembagaan (*enforcement*). Dalam hubungan *Principles* dan *Agents*, idealnya menurut North (1996), *Principles* memiliki daya untuk mendisiplinkan *Agents* sesuai dengan tujuan perusahaan/ lembaga, disamping itu, *Agents* dapat memonitor *Principles* dan menegakkan apa yang menjadi hak mereka dalam perjanjian yang diatur diawal hubungan *Principles* dan *Agents* (Nort, 1996: 33).

Enforcement adalah alat yang penting untuk mencapai fungsi institusi yang berjalan dengan baik. Burky, and Perry (1998) berpendapat bahwa *enforcement institution* adalah cara tepat untuk meyakinkan bahwa agent akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal's (Wihana, 2005 p:129).

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa adanya hubungan yang saling mengontrol dengan seimbang satu sama lainnya. Selalu ada pihak kedua diluar kelompok mereka, baik *Principles* atau kelompok *Agents* yang berupaya agar pihak lain diluar mereka bekerja dengan baik. Menurut North (1996) hal ini dianggap sebagai salah satu kemungkinan dapat ditegakkannya kelembagaan. Lebih lanjut North melihat bahwa *enforcement* dapat ditegakkan dari penegakkan aturan main internal (*code of conduct*) atau juga dapat muncul karena sanksi sosial atau adanya alat pemaksa dari pihak ketiga seperti negara dalam bentuk

undang-undang dan sejenisnya (North, 1996: 33).

PENUTUP

Karet di kabupaten Pelalawan bisa dikatakan sebagai komoditas yang diunggulkan. Sebagian besar masyarakat di kabupaten Pelalawan menggantungkan hidupnya pada komoditas ini. Oleh sebab itu, perhatian dan pengawasan terhadap ketiga komoditas ini harus dilakukan seserius mungkin. Dari penelitian terhadap ketiga komoditas ini, ditemukan banyak persoalan mendasar yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi petani perkebunan Karet. Salah satu persoalan tersebut adalah persoalan pemasaran produk hasil perkebunan mereka.

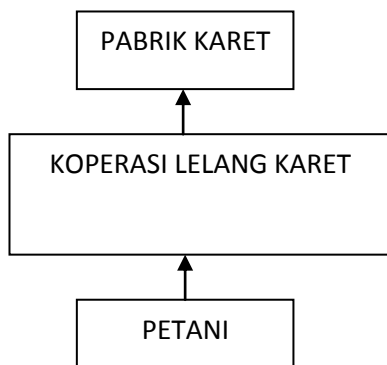
Berdasarkan analisa peneliti terhadap mekanisme pemasaran produk perkebunan Karet, mata rantai pemasaran yang masih relatif panjang menjadi salah satu penyebab minimnya pendapatan yang diperoleh petani perkebunan. Disisi lain ketiadaan pabrik produk jadi berbahan baku karet di Kabupaten Pelalawan menyebabkan belum bisa mendongkrak harga komoditi dan memperpendek jarak sehingga biaya angkut yang dibebankan ke petani karet masih relatif besar.

Dinas Perindustri dan Perdagangan yang memiliki otoritas dalam membina dan mengawasi aktifitas perdagangan sudah saatnya menerapkan sistem pemasaran alternatif dan melakukan pengawasan dengan terlibat secara partisipatif membangun sistem pemasaran alternatif tersebut termasuk membangun sistem pengawasannya.

Sistem pemasaran alternatif dapat mengurangi mata rantai pemasaran hasil panen karet. Sistem yang memungkinkan diterapkan adalah dibentuknya koperasi lelang petani karet yang berperan melaksanakan pemasaran yang bisa langsung menghubungkan

petani dengan pabrik. Dengan dibentuknya koperasi lelang ini, biaya yang harus ditanggung petani yang disebabkan oleh panjangnya mata rantai tersebut dapat dikurangi. Disamping itu dengan didirikannya koperasi, maka koperasi dapat berperan maksimal dalam membina dan mengontrol petani agar meningkatkan kualitas hasil panen mereka (untuk karet tidak lagi bertatal) sehingga harga jual karet bisa menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Dalam mendirikan, menyusun sistem, menjalankan sistem dan melakukan pengawasan, koperasi lelang karet ini bisa bermitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga pabrik karet itu sendiri. Berikut bagan pola pemasaran alternatif yang bisa diterapkan dikalangan petani karet.

Gambar 3: Sistem Pemasaran Produk Karet alternatif



Dari bagan sistem pemasaran alternatif tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pengurangan mata rantai pemasaran. Petani dalam hal ini berhubungan dengan Koperasi Lelang Karet. Dengan adanya koperasi ini, petani tidak lagi menanggung pengurangan pendapatan akibat panjangnya mata rantai pemasaran. Disamping itu petani dapat mengakses langsung informasi dari pabrik karet, terutama berkaitan dengan kebijakan harga.

Dengan pola partisipatif, Peran Dinas Perindustri dan Perdagangan

disatu sisi sebagai pengawas, namun disisi lain yang paling terpenting adalah berperan menjadi mitra strategis para petani karet untuk secara bersama-sama memperbaiki kekurangan-kekurangan sistem pemasaran yang selama ini diterapkan pada perdagangan hasil perkebunan karet. Disamping itu Dinas Perindustri dan Perdagangan bisa berperan sebagai katalisator/ penghubung dan penyeimbang regulasi antara perusahaan dan petani karet terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap penentuan harga komoditas tersebut ditingkat pabrik.

Ketika akan direkomendasikan adanya mekanisme lelang karet yang dikelola oleh Koperasi Karet, maka peran Desperindag dalam hal ini adalah mendampingi petani untuk mendirikan Koperasi Karet, mengkomunikasikan rencana ini dengan pihak pabrik, bersama-sama dengan petani dan koperasi secara partisipatif membangun sistem mekanisme lelang serta membuat sistem pengawasan terhadap aktifitas ini secara partisipatif juga agar setiap pihak merasa punya tanggungjawab untuk mematuhi aturan main yang dibuat.

Perlahan namun pasti, kedepannya keberadaan lembaga-lembaga ini bisa dikembangkan untuk memainkan peran yang lebih luas seperti pembinaan para petani dan juga pengelolaan pengadaan pupuk dan bibit yang merupakan faktor penting peningkatan produktifitas perkebunan karet di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 2005, *An Assesment of Microfinance Institution Performance: The Importance of Institutional Environment, dalam Gadjah Mada International Journal of Busisness, September-Desember 2005, Vol vii No. 3:*

391- 427

- Arsyad, Lincoln, 2005, *An Assessment Of Performance And Sustainability Of Microfinance Institutions: A Case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia*, Unpublished PhD Thesis, Adelaide, Australia: Flinders University
- Jaya, Wihana Kirana, 2004, *Institution Matter in Regional Autonomy Transition dalam Regional Development in The Era of Decentralization, Growth, Poverty and the Environment*, Armida S. Alisyahbana dan Bambang P.S. Brodjonegoro (Editor), Indonesian Regional Science Association, Bandung
- Kherallah, Mylène and Kirsten, Johann, 2001 *The New Institutional Economics: Applications For Agricultural Policy Research In Developing Countries*, MSSD Discussion Paper NO. 41 International Food Policy Research Institute
- Klein, Peter G, *New Institutional Economics*, 1999 dalam <http://www.cec.zju.edu.cn/~yao/uploadfile/papers/p007.pdf#search=%22new%20institutional%20economic%20journal%22>
- Maimun, 2009 *Analisis Pendapatan Usaha Tani Dan Nilai Tambah Saluran Pemasaran Kopi Arabika Organik dan Non Organik*.
- Moldoveanu, Mihnea and Martin, Roger, *Agency Theory and the Design of Efficient Governance Mechanisms*, Rotman School of Management University of Toronto, February 2, 2001 dalam <http://www.rotman.utoronto.ca/rogermartin/Agencytheory.pdf#search=%22agency%20theory%22>
- Padilla, Alexandre, 2002 *The Property Economics of Agency Problems* Metropolitan State College of Denver - Department of Economics; Faculté d'Economie Appliquée - Centre d'Analyse Economique.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim dan D. Panuju. 2005. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Edisi September 2007, Program Studi PWD-IPB. Bogor.
- Soeharjo, A. dan D. Patong. 1973. *Sendi-Sendi Pokok Usahatani*. IPB. Bogor.
- Soekartawi. 1990. *Ilmu-Ilmu Usahatani*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekarwati. A. S. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil* direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Departemen dan kebudayaan Penerbit. Universitas Indonesia. Cetakan ketiga. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan, Defenisi, Teori dan Strategi*. Bayumedia. Malang.